



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

DD NANGAI AMEN NGENDAP DI RKUD

**Dampak Dugaan
Korupsi DD 2018**

PELABAI - Tidak hanya berpotensi memjarakan kepala desa, dugaan korupsi atau penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara juga menghambat realisasi anggaran tahun ini. Sampai saat ini DD dan ADD Nangai Amen tahun ini senilai Rp 736 juta yang seharusnya dicairkan di tahap I dan tahap II masih mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Lebong.

Dapat dipastikan sisa DD dan ADD senilai Rp 500 juta lagi untuk pencairan tahap III Desa Nangai Amen yang masih di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) juga tidak bisa ditransfer ke RKUD. "Tahun ini Desa Nangai Amen diberi jatah DD senilai Rp 815 juta dan ADD Rp 421 juta, namun tidak bisa dicairkan karena terkendala laporan realisasi DD dan ADD tahun 2018," ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Lebong,

Eko Budi Santoso, SP, M.Eng.

Diakuinya, DD dan ADD tahap I dan tahap II Desa Nangai Amen itu tidak bisa cair karena Dinas PMDS belum mengeluarkan rekomendasi pencairan. Rekomendasi baru bisa dikeluarkan jika Pemerintah Desa Nangai Amen menyerahkan laporan realisasi DD dan ADD tahap III tahun 2018 ke PMDS untuk selanjutnya diaudit Inspektorat. "Nilai yang belum dilaporkan Rp 464 juta dengan rincian DD Rp 286 juta dan ADD Rp 178 juta," terang Eko.

Terkait proses hukum yang saat ini masih diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong, Eko enggan komentar. Namun tidak dipungkirinya, pemeriksaan oleh Kejari itu ada keterkaitan dengan tidak dilaporkannya realisasi DD dan ADD tahap III. Justru itu diharapkan, 92 desa yang seluruhnya telah mencairkan DD tahap I tahun ini benar-benar membuat laporan secara profesional.

"Soalnya tidak hanya menjadi dasar pencairan tahap berikutnya, laporan yang tidak beres jelas membuka akses diproses hukum," tandas Eko. (sca)